

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengangguran

1. Pengertian Pengangguran

Pengangguran atau karya (*unemployment*) menjadi salah satu permasalahan penting dalam perekonomian makro, terlebih bagi negara-negara berkembang. Permasalahan satu ini memiliki dampak langsung terhadap standar kehidupan dan tekanan psikologis masyarakat dalam jangka panjang. Berbagai kekacauan baik dari politik ataupun sosial dapat menimpa suatu negara. Sementara untuk individu, dapat menurunkan pendapatan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan kehidupannya³³.

Bukan berarti seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan tetapi belum mendapatkan dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Yang dikategorikan sebagai pengangguran apabila seseorang yang tergolong angkatan kerja mempunyai kemauan untuk bekerja dan siap bekerja, namun tidak ada upaya untuk mencari pekerjaan dalam empat minggu terakhir³⁴. Permasalahan makro yang satu ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, karena dapat menurunkan standar hidup, menambah tekanan atau beban psikologis dan dapat menyebabkan permasalahan dalam keluarga akibat tidak adanya

³³ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 197-198

³⁴ Paulus Kurniawan dan Made Kembar Sri Budhi, *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2015), hal. 129

pendapatan yang mencukupi³⁵.

Apabila pengangguran dijadikan bentuk presentase, disebut sebagai tingkat pengangguran (*unemployment rate*) yang didapat melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Dengan mengkomparasikan jumlah tenaga kerja yang belum kerja tetapi tengah aktif mencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat dihitung dalam bentuk persen dengan rumus sebagai berikut ³⁶ :

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Pada dasarnya , kondisi semua angkatan kerja tidak selalu memperoleh pekerjaan atau terserap dalam pasar kerja. Dalam hal ini berarti pengangguran sebenarnya tidak bisa dihilangkan secara penuh. Pengangguran akan selalu ada di negara dengan kekuatan ekonomi sekalipun. Namun, adapula teori mazhab klasik dengan teorinya yang terkenal sebagai hukum “Say” dari Jean Bapbtise (1767-1832) yang menyebut “ *Supply creates its own demand*” yang berarti penawaran menciptakan permintaanya sendiri. Dengan demikian, pengangguran tidak akan selalu ada , jika adapun tidak akan bertahan lama. Jadi, keadaan tersebut berkaitan dengan tingkat produktivitas suatu produsen untuk menciptakan lowongan pekerjaan baru³⁷.

Dalam kamus bahasa indonesia, pengangguran diartikan tidak

³⁵ Kumba Digdowiseiso, *Perekonomian Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Makro* , (Jakarta : LPU-UNAS, 2018), hal.222

³⁶ Rustan, *Pusaran Pembangunan Ekonomi*, (Makassar : CV SAH MEDIA, 2019), hal.96

³⁷ Iskandar Putong, *Ekonomi Mikro : Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Jakarta : Buku & Artikel Karya Putong, 2015), hal.179

bekerja, tidak melakukan apa-apa³⁸. Umumnya, pengangguran didefinisikan sebagai situasi yang mana suatu sumber daya manusia tidak dimanfaatkan³⁹. Hakikat dari pengangguran bukan semata-mata kondisi seseorang yang tidak bekerja, melainkan seseorang telah memiliki keinginan untuk bekerja dan berupaya untuk mencari pekerjaan tetapi tidak memperoleh pekerjaan dengan berbagai alasan⁴⁰.

Dalam kamus ekonomi dan bisnis, pengangguran didefinisikan sebagai :

Kondisi yang menunjukkan ketidakikutsertaan seseorang tenaga kerja yang berada di usia produktif dalam kegiatan produksi, akibat dari minimnya jumlah kesempatan kerja dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang ada.⁴¹

Mulyadi mengartikan pengangguran adalah :

Angka yang mencerminkan banyaknya tenaga kerja yang termasuk angkatan kerja yang dalam proses mencari pekerjaan⁴².

Sementara, berdasarkan survey angkatan kerja nasional , yang dimaksud dengan pengangguran ialah seseorang yang benar-benar tidak bekerja dalam waktu kurang dari 2 hari dalam satu minggu sebelum pencacahan dan telah mengupayakan pencarian lowongan kerja. Terdapat beberapa ketidakcocokkan antara *demand* dengan *supply* tenaga kerja dalam pasar kerja sehingga memicu penambahan pengangguran. Seperti

³⁸ Emawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Bmedia, 2017), hal. 18

³⁹ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro...*, hal.198

⁴⁰ Aang Curatman, *Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Penerbit Swagati Press, 2010), hal.96

⁴¹ Pamungkas Edi Kurnianto, *Kamus Ekonomi & Bisnis*, (Surabaya : CV Mas Sejahtera, 2012), hal. 411

⁴² Achmad Slamet, *Database Pengangguran Berpendidikan Tinggi Di Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal. 48

ketidakcocokan keahlian, pendidikan yang diminta. Masih terhubung dengan pembahasan tersebut, karena ketidakcocokan tawar menawar tenaga di pasar kerja menyebabkan mis-alokasi sumber daya yang sementara dan dapat diatasi dengan mekanisme pasar⁴³.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi dimana seseorang yang telah memasuki usia produktif dan termasuk angkatan kerja belum memperoleh pekerjaan, masih tahap mencari pekerjaan dan memiliki keinginan mencari pekerjaan. Berbagai faktor menyebabkan seseorang tersebut belum memperoleh pekerjaan seperti kurangnya peluang kerja, tidak memenuhi kualifikasi yang diminta oleh pasar kerja maupun sudah menyerah akan keadaan.

2. Jenis-jenis Pengangguran

Terdapat beberapa jenis pengangguran yang didasarkan oleh penyebabnya, menurut Nanga diantara lain :

- a) Pengangguran Friksional (*frictional unemployment*) ialah pengangguran yang diakibatkan oleh adanya peralihan dari *frictional unemployment*) ialah pengangguran yang diakibatkan oleh adanya peralihan dari tempat kerja satu ke tempat kerja lain yang menyediakan gaji yang lebih tinggi. Jadi seseorang tersebut menganggur untuk sementara waktu. Biasanya, hal ini terjadi di

⁴³ Syamsul Arifin, *Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat*, (Banyumas : Pena Persada, 2020), hal.23

negara yang perekonomiannya telah maju, karena jumlah penganggurannya rendah dengan peluang kerja yang melimpah⁴⁴.

- b) Pengangguran Struktural (*structural unemployment*) yakni pengangguran yang disebabkan karena perubahan *demand* dan juga *supply* tenaga kerja di pasar kerja, sehingga terjadi ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja yang diinginkan disitu. Hal tersebut dapat dipicu , akibat dari meningkatnya *demand* suatu jenis pekerjaan, sedangkan jenis yang lainnya mengalami kemerosotan. Sedangkan, *demand* nya tenaga kerja pun tidak bisa cepat beradaptasi dalam situasi tersebut. Adapun banyak faktor yang dapat berpengaruh situasi itu, diantaranya adanya barang baru yang lebih bagus, kemajuan IPTEK, kuantitas produksi yang menurun dan sebagainya.
- c) Pengangguran Alamiah (*natural unemployment*) yaitu pengangguran yang diakibatkan tidak mampu terserapnya tenaga kerja meskipun seluruh kapasitas produksi (alat-alat produksi) telah tersedia. Dan juga seluruh faktor produksi itu sudah dipakai sepenuhnya (*full employment*). Tidak terserapnya tenaga kerja inilah yang diartikan sebagai pengangguran alamiah.
- d) Pengangguran Konjungtur atau siklis (*cyclical unemployment*) yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penurunan ekonomi (resesi) dan situasi dimana permintaan agregat juga mengalami kemerosotan. Sehingga, terjadi penumpukan barang yang memicu terjadinya

⁴⁴ Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro.....*, hal. 199

pengurangan tenaga kerja (PHK) sekaligus penambahan jumlah pengangguran. Ketika perekonomian meningkat, maka pengangguran jenis ini akan turun⁴⁵.

Sementara ada 4 jenis pengangguran apabila ditinjau dari ciri-cirinya , meliputi :

- a. Pengangguran terbuka (*open unemployment*) , yaitu pengangguran yang terbentuk dari imbas rendahnya pertumbuhan peluang kerja , apabila dikomparasikan dengan tenaga kerja yang terus bertambah. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini mengakibatkan tenaga kerja tersebut tidak melaksanakan sesuatu pekerjaan sepanjang waktu dan secara nyata. Sehingga, disebutlah pengangguran terbuka.
- b. Pengangguran Tersembunyi (*disguised unemployment*), yaitu kondisi dimana dalam suatu perusahaan atau usaha ekonomi terdapat kelebihan pekerja dari pekerjaan yang sesungguhnya dilaksanakan. Dalam artian, terjadi ketidakefisienan dalam kegiatan ekonomi tersebut. Surplus pekerja itulah yang dinamakan pengangguran tersembunyi. Contoh : Pelayan restoran terlalu banyak dari yang dibutuhkan dan keluarga petani dengan keluarga besarnya menggarap sawah yang kecil.
- c. Pengangguran Musiman (*seasonal unemployment*), yaitu seorang pekerja ada waktunya bekerja dan ada waktunya tidak bekerja.

⁴⁵ Mukhtar dkk, *Database Kebutuhan Pelatihan Kerja Di Sulawesi Tenggara*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hal.33-34

Biasanya pengangguran ini terjadi pada seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian dan perikanan. Saat musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak bisa melakukan pekerjaan, sehingga menganggur. Demikian pula seorang petani yang bergantung pada musim tanam dan tidak begitu melakukan pekerjaan saat setelah tanam dan se usai menuai⁴⁶.

- d. Setengah menganggur (*underemployment*), yaitu keadaan seseorang tenaga kerja dimana jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu, atau bisa dibilang dibawah jam normalnya. Kondisi setengah menganggur sendiri dibagi kembali menjadi 2 kategori : (1) setengah menganggur terpaksa, ialah perihal jam kerja tenaga kerja yang di bawah jam normal , akan tetapi si pekerja tersebut masih mencari ataupun mau menerima pekerjaan, (2) setengah menganggur sukarela (pekerja paruh waktu/*part time worker*) , ialah perihal jam kerja tenaga kerja yang di bawah jam normal , akan tetapi si pekerja tersebut tidak berusaha mencari pekerjaan atau menerima pekerjaan lain, (3) setengah menganggur tidak kentara ialah baik jumlah produktivitas maupun penghasil lebih rendah , jika dianalogikan dengan jumlah jam kerja pekerja⁴⁷.

3. Faktor- Faktor Yang Menyebabkan Pengangguran

⁴⁶ Amirrudin Idris, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal.122-123

⁴⁷ Sinilius Seran, *Pendidikan & Pertumbuhan Ekonomi versus Kemiskinan Penduduk (Kasus Provinsi Nusa Tenggara Timur)*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hal. 95

- a. Penambahan jumlah penduduk yang tinggi . Pertumbuhan penduduk dengan tidak diikuti dengan pertumbuhan lapangan kerja baru, sehingga menyebabkan meningkatkan pengangguran
- b. Rendahnya laju investasi produktif. Investasi produktif adalah suatu penanaman modal yang diarahkan kepada sektor-sektor yang berfokus pada *labour intensif*. Menurunnya investasi produktif menyebabkan turunnya sumber daya manusia , sehingga pengangguran mengalami peningkatan
- c. Siklus Bisnis Yang Melambat. Keadaan perekonomian yang melambat menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja. Sehingga mendorong perusahaan untuk mengurangi kebutuhan tenaganya
- d. Rendahnya Kualitas Pendidikan. Rendahnya kualitas dan kualifikasi pendidikan bisa juga memicu pengangguran, akibat tenaga kerja yang tersedia tidak memenuhi kualifikasi permintaan dunia usaha. Sehingga banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan.⁴⁸
- e. Orientasi Kebijakan pembangunan ekonomi
Terdapat sistem konglomerasi di mana ada beberapa perusahaan yang dianggap potensial mendapatkan hak istimewa Sehingga yang tadinya maksudnya untuk mensejahterakan masyarakat bersama, malah menyebabkan terabaikannya faktor kesempatan kerja penuh, yang nantinya dapat meningkatkan jumlah pengangguran
- f. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia

⁴⁸ Dwi Septa Aryani, Yuni Rachmawati dan Agung Anggoro Seto, *Ekonomi Syariah (Dengan Pendekatan Penelitian)*, (Kuningan : Nusa Litera Inspirasi, 2019), hal.26-28

Kurangnya perhatian pemerintahan di bidang pendidikan, ditambah juga pelaksanaan pendidikan non formal seperti pelatihan berjalan belum sesuai dengan ekspektasi , karena lembaga-lembaga pelatihan yang dikelola Depnakertrans belum mampu mengimbangi syarat-syarat edukasi yang diminta oleh pengusaha

g. Daya Saing Industri

Daya saing industri Indonesia tergolong masih rendah, padahal daya saing sangat dibutuhkan untuk kemajuan industri dan kesempatan kerja juga turut meningkat, serta akan menekan pengangguran.

h. Globalisasi

Globalisasi ialah proses integrasi baik pertukaran produk, budaya, teknologi , produk hingga pemikiran yang tersebar luas tanpa batas di seluruh dunia. Proses globalisasi ini menyebabkan persaingan bebas antar negara, demikian juga pertukaran tenaga kerja dari satu negara ke negara lain. Sehingga, semua tenaga kerja akan menghadapi *pressure* supaya dapat bersaing. Karena Indonesia memiliki tenaga kerja yang melimpah, maka mengirim tenaga kerja ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran⁴⁹

4. Cara-cara mengatasi pengangguran

Berbagai usaha efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran diantaranya⁵⁰ :

⁴⁹ Sutasyie Soemitra Remi et al, *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*, (Bandung : Unpad Press, 2015), hal. 54-55.

⁵⁰ Ilmawati Fahmi Imron dan Kuku Andri Aka, *Fenomena Sosial*, (Banyuwangi : LPPM Institut Islam Ibrahimy Genteng , 2018), hal. 22

- a. Meningkatkan mutu pendidikan
 - b. Meningkatkan latihan kerja untuk memenuhi kebutuhan keterampilan sesuai tuntutan industri modern
 - c. Meningkatkan dan mendorong kewiraswastaan
 - d. Mendorong terbukanya kesempatan usaha-usaha informal
 - e. Meningkatkan pembangunan dengan sistem padat karya
 - f. Membuka kesempatan kerja ke luar negeri
5. Kebijakan dari pemerintah sebagai solusi mengatasi pengangguran
- a. Pemberian bantuan wawasan dan pengetahuan serta kemampuan jiwa *entrepreneur* kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Bentuknya berupa bimbingan teknis dan manajemen modal, bantuan modal, perluasan pasar, pemberian fasilitas , serta pembentukan kelompok usaha bersama
 - b. Melakukan perbaikan, pembangunan serta pengembangan khusus terhadap wilayah-wilayah yang termasuk kawasan prioritas. Guna memanfaatkan secara potensi yang ada di wilayah tersebut sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan
 - c. Pembangunan lembaga penjaminan kehidupan para penganggur seperti : PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 - d. Mempermudah perizinan dan meningkatkan pengamanan investasi asing maupun dalam negeri
 - e. Melakkan promosi-promosi terhadap pariwisata dan kebudayaan daerah setempat

- f. Melakukan kerjasama yang baik antara BUMN dan BUMS
 - g. Menekan laju pertumbuhan penduduk
 - h. Memilah milah TKI yang akan dikirimkan ke luar negeri
 - i. Penyempurnaan kurikulum dan sistem pendidikan
 - j. Pengembangan potensi di sektor pertanian dan kelautan⁵¹
6. Pengangguran dalam Pandangan Islam

Menurut bahasa pengangguran (*Al Baththalah*) dalam *Al-Mausu'ab Al-Fiqbiyyah (Ensklopedia Fikih)* ialah berhenti bekerja.. dan hukumnya didasarkan pada situasi yang terjadi , sebagai berikut⁵² :

- a. Pengangguran hukumnya haram, apabila seseorang masih mampu untuk mencari nafkah dan memerlukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Akan tetapi memilih untuk fokus beribadah
- b. Pengangguran hukumnya makruh dan pelakunya berdosa, ketika seseorang malas untuk bekerja dan tidak memerlukan pekerjaan tersebut
- c. Sementara hukum pengangguran udzur , apabila seseorang tersebut tidak bekerja akibat terjangkit penyakit parah, tahunan maupun cacat. Maka hukumnya tidak berdosa dan tidak pula makruh

Tawakal bukan mengajarkan untuk seseorang untuk pengangguran, telah jelas bahwasannya Islam tidak menerima istilah pengangguran sebagai bentuk ibadah dengan catatan sebab akibatnya. Karena

⁵¹ *Ibid*, hal. 24- 27

⁵² Abdul Fattah As-Samman, *Harta Nabi Sumber , Pembelanjaan & Wakaf, terj Masturi*, (Jakarta : PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2018), hal. 20

menurut pandangan Islam, pengangguran berarti tidak melakukan pekerjaan apapun , sehingga dunia menjadi tidak terawat. Padahal, Allah SWT selalu mengajarkan bagi umat-umatNya supaya senantiasa berupaya keras di bumi sebagai khalifah⁵³.

Dalam ajaran Islam , berusaha atau bekerja merupakan bagian dari Islam itu sendiri. Bahkan dalam firmanNya Allah SWT mengungkapkan bahwa bekerja sebagai kewajiban umat-Nya dan menyebutkan berdagang menjadi profesi yang sangat dianjurkan oleh Islam demikian yang telah dilakukan oleh Rasulullah dahulu.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Q.S Al Jumua [62] :10)⁵⁴

Rasulullah sendiri juga pernah ditanya oleh sahabatnya , “ Pekerjaan apa yang paling baik wahai Rasulullah?” . Rasulullah pun menjawab , “ Seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih⁵⁵.”

Oleh karena itulah, bekerja keras amatlah penting. Berdasarkan ayat dan hadist diatas maka dapat disimpulkan memang bekerja adalah hal yang wajib , sehingga apabila umat Islam melaksanakannya maka

⁵³ *Ibid*, hal.20

⁵⁴ Naf'an Akhun, *Al Qur'an Terjemahan Depag PDF Interactive v201905*, (Semarang : CV Toha Putra, 2019), hal.923

⁵⁵ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta : Penerbit Jogja Great! Publisher, 2010), hal.37

akan bernilai ibadah dan memperoleh pahala. Disisi lain, apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa dan mendapat murka-Nya Allah SWT. Tak ada istilah, menggantungkan hidup kita kepada orang lain apalagi sampai berhutang dan meminta-minta, hingga mengharap belas kasihan orang lain⁵⁶.

B. Angkatan Kerja

1. Pengertian Ketenagakerjaan

Dalam perekonomian, sumberdaya manusia mempunyai peran yang sangat vital dalam hal meningkatkan produktifitas suatu wilayah. Diharapkan, semakin banyak sumberdaya manusia suatu wilayah akan meningkatkan pendapatan nasional. Ketika sumberdaya manusia yang melimpah dapat dimaksimalkan, maka akan dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Walaupun demikian, sumberdaya manusia yang dapat dioptimalkan untuk aktifitas produksi terkendala pada usia yaitu berkisar 15-64 tahun. Yang dapat dikategorikan sebagai sumberdaya manusia produktif adalah angkatan kerja. Angkatan kerja sangat dipengaruhi pertumbuhan jumlah penduduk di suatu wilayah, semakin banyak jumlahnya , maka semakin banyak pula sumberdaya manusia yang dapat dilibatkan dalam proses produksi⁵⁷.

Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan

⁵⁶ *Ibid*, hal.37

⁵⁷ Khusnul Khotimah, *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, Dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di DIY Tahun 2009-2015*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan,2018), hal.35

tenaga kerja. Dalam pasal 2 Ayat 2 UU No.13 Tahun 2013 diterangkan bahwa tenaga kerja adalah ia yang sedang melakukan pekerjaan baik itu perempuan maupun laki-laki, yang mana tujuannya untuk menghasilkan produk guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tenaga kerja dikelompokkan menjadi 2 yaitu kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja⁵⁸.

Dalam badan pusat statistik diterangkan bahwa angkatan kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja (15 tahun dan lebih) yang sudah bekerja atau memiliki pekerjaan, akan tetapi untuk beberapa waktu tidak bekerja dan pengangguran⁵⁹. Lebih lanjut lagi, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan oleh Suryana sebagai penduduk yang bekerja dan belum bekerja, namun sebenarnya dia sudah siap untuk bekerja atau saat ini sedang berupaya mencari pekerja pada tingkat upah yang ditetapkan. Penduduk yang bekerja dalam hal ini ialah mereka yang melakukan pekerjaan, guna menghasilkan barang dan jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan, baik yang bekerja secara penuh maupun tidak⁶⁰.

2. Pengelompokan Tenaga Kerja

Tenaga kerja (*manpower*) dibagi atas 2 kelompok angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Golongan yang masuk kategori angkatan

⁵⁸ Zaeni Asyehedi dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta : Prenamedia,2019), hal.1

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “*Tenaga Kerja*” dalam <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>, diakses 6 Oktober 2020

⁶⁰ Sofiatius Zahroh, *Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kota Malang*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Vol 5 No.2 TAHUN 2017, hal.1-11

kerja (*labour force*) sebagai berikut :

- a. Kelompok yang bekerja
- b. Kelompok yang pengangguran atau dalam tahap pencarian pekerjaan

Disisi yang berbeda, terdapat tenaga kerja yang tidak termasuk angkatan kerja atau biasa disebut *Potential Labour Force (PLF)*. Dinamakan *PLF* karena, golongan ini memiliki peluang untuk melaksanakan pekerjaan selayaknya angkatan kerja, walaupun mereka tidak terhitung dalam angkatan kerja⁶¹.

Kelompok yang tidak termasuk angkatan kerja ialah :

- a) Kelompok yang bersekolah, adalah mereka-mereka yang aktifitas utamanya hanya bersekolah
- b) Kelompok yang mengurus rumah tangga, adalah mereka yang aktivitasnya mengurus rumah tangga tanpa diberikan upah
- c) Kelompok lain-lain atau penerima pendapatan

Kelompok ini dibagi menjadi 2 macam yaitu kelompok yang menerima pendapatan seperti dari dana pensiunan, bunga atas simpanan uang atau sewa. Kelompok yang kedua yaitu mereka yang hidupnya menggantungkan diri kepada orang lain, seperti orang yang telah lansia, cacat maupun sakit kronis⁶²

3. Teori Angkatan Kerja

- a. Teori Klasik Adam Smith (1729-1790)

Dalam teorinya Adam Smith mengutarakan bahwa penempatan

⁶¹ Indra Afrita, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Di Indonesia*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2015), hal. 16

⁶² *Ibid*, hal.17

sumber daya manusia yang efektif adalah awal dari pertumbuhan ekonomi, bisa dikatakan penempatan sumber daya manusia menjadi syarat untuk tumbuhnya perekonomian yang kemudian dapat menciptakan akumulasi modal.

b. Teori John Mayner Keynes (1883-1946)

Teori Keynes ini bertolak belakang dengan teori klasik yang diungkapkan oleh Adam, di mana realitanya pekerja mempunyai serikat kerja yang selalu berupaya untuk memperjuangkan upah yang diterimanya. Diturunkannya upah kemungkinan kecil, paparnya karena kalau upah turun maka tingkat pendapatan menjadi turun. Sehingga, daya beli masyarakat akan berkurang pula

c. Teori Lewis (1959)

Melimpahnya pekerja menurut teori bukan merupakan suatu problem, jika peningkatan tersebut diikuti oleh terserapnya pekerja tersebut dalam industri modern. Ketika hal tersebut terjadi, maka tingkat upah pedesaan meningkat yang berdampak pula mengurangi kesenjangan antara perkotaan dengan pedesaan⁶³.

C. Upah Minimum

1. Pengertian Upah

Dewan Penelitian Pengupahan Nasional mengartikan upah sebagai suatu pemberian imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja atas

⁶³ Hadi Setiawan, *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Tenaga Kerja Dan Infrastruktur Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi DKI Jakarta*, (Jakarta : Repository UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hal. 36-37

jasa atau pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Maksud pemberian upah tersebut tak lain agar si pekerja bisa terjamin keberlangsungan hidupnya secara layak , yang biasanya berbentuk uang⁶⁴. Menurut Rivai, upah ialah bentuk pemenuhan balas jasa dari suatu organisasi yang layak dan adil kepada karyawannya yang disesuaikan dengan lamanya bekerja dan output yang dihasilkan atau banyaknya pekerjaan yang dilakukan⁶⁵. Upah adalah imbalan berbentuk uang langsung yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jam kerja, jumlah output yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan⁶⁶.

2. Upah Minimum

Terdapat berbagai jenis upah , diantaranya upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok, sekaligus tunjangan kerja dengan maksud melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang majikan⁶⁷. Upah minimum sendiri dijadikan patokan oleh para wirausahawan dalam menentukan upah riil yang diberikan pekerja atau buruh di perusahaannya⁶⁸. Upah minimum terbagi atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ Kota (UMK) dan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi

⁶⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 874

⁶⁵ Juliyanti Maria Marpaung, *Pengaruh Migrasi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Pekanbaru Tahun 2000-2014*, JOM Fekon, Vol 4. No 1(Februari) 2017, hal.405-419

⁶⁶ Hendy Tanady, *Psikologi Industri dan Organisasi*, (Yogyakarta : Expert, 2018), hal. 189

⁶⁷ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung : Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif- Bonus-THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun-Pesangon, Iuran Jamsostek/ Dana Sehat*, (Jakarta : Praninta Offset, 2008), hal. 57

⁶⁸ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2019), hal.81

atau kabupaten /kota.

Secara general, upah minimum ditetapkan oleh pemerintah (Gubernur mencermati masukan dari Dewan Pengupahan Provinsi dan / atau bupati/walikota) yang dapat berubah-ubah tiap tahunnya. Presentase perubahan upah minimum bergantung situasi di tiap wilayah atau daerah provinsi maupaun kabupaten/ kota yang dilandaskan pada beberapa aspek , meliputi kebutuhan hidup minimal (KHL), Indeks Harga Konsumen (IHK), kemampuan perkembangan dan eksistensi perusahaan, upah yang berlaku dalam daerah tersebut dan daerah satu dengan lainnya , serta situasi pasar kerja dan tingkat perkembangan perekonomian maupun pendapatan per kapita.⁶⁹

Adapun sasaran yang dicapai dengan adanya penetapan upah minimum meliputi :

- a. Untuk menunjukkan peran dan urgensi pekerja atau buruh sebagai bagian dalam suatu kontrak kerja
- b. Untuk melindungi dari sistem pengupahan yang sangat rendah dan kurang memuaskan
- c. Untuk mendorong kesesuaian pemberian upah dengan apa yang telah dikerjakan
- d. Untuk mengupayakan terjaminnya rasa tenang dan damai dalam lingkungan kerja

⁶⁹ Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung.....*hal. 57

e. Untuk mendorong meningkatnya patokan hidup yang normal⁷⁰

3. Indikator- indikator Yang Mempengaruhi Tingkat Upah

a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja

Pekerjaan yang memerlukan kemahiran yang tinggi dan pekerja yang sedikit cenderung memiliki imbalan yang tinggi. Berbeda pula dengan pekerjaan yang memerlukan tenaga kerja tinggi tanpa keterampilan tinggi, cenderung memiliki upah yang rendah

b. Produktivitas Kerja

Produktivitas menyangkut atas sumbangasih yang diberikan suatu pekerja terhadap tempat dia bekerja. Semakin tinggi sumbangasih yang diberikannya, maka tingkat upahnyapun sepadan dengan apa yang dia berikan pada perusahaan

c. Pemerintah

Pemerintah selaku pembuat regulasi akan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengupahan, yang mana sifatnya mengikat dan memaksa.

d. Biaya Hidup

Apabila dalam suatu wilayah memiliki biaya hidup yang mahal, bisa dipastikan tingkat upah di wilayah tersebut akan tinggi. Sebaliknya, apabila di suatu wilayah tersebut biaya hidupnya rendah akan rendah pula tingkat upahnya

e. Posisi Jabatan Karyawan

⁷⁰ Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan.....* hal. 82

Posisi mempengaruhi berapa imbalan yang diperoleh atas kerja kerasnya. Ketika jabatan telah tinggi, maka diikuti pula dengan kenaikan imbalan yang diperolehnya. Karena orang berjabatan yang tinggi selalu mempunyai tanggungjawab yang berat pula

f. Pendidikan dan Pengalaman Kerja

Keduanya memiliki hubungan positif dengan tingkat penetapan upah . Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka biasanya kinerja dan pengalaman jauh lebih tinggi . Sehingga, tingkat upah yang diperoleh juga akan tinggi. Sebaliknya, apabila tingkat pendidikan dan pengalaman rendah, maka demikian halnya dengan tingkat upahnya pun rendah

g. Situasi Perekonomian Nasional

Tingkat upah akan tinggi ketika kondisi perekonomian tengah dalam kemajuan, karena perusahaan tentu akan melakukan produksi. Dengan demikian, banyak masyarakat yang akan terserap dalam industri tersebut. Keadaan berbeda, apabila perekonomian berada dalam resesi yang dapat memicu pengangguran. Sehingga, tingkat upah turut menurun

h. Jenis dan Sifat Pekerjaan

Jenis dan sifat pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap keselamatan maupun kesehatan dan memerlukan keahlian khusus tentu akan berbeda dengan jenis pekerjaan yang tidak begitu berisiko tinggi . Yang memiliki risiko tinggi tersebut, tentu saja akan mendapatkan

penawaran tingkat upah yang lebih tinggi.⁷¹

4. Teori Upah

a. Teori Philips

Dalam studinya Philips menemukan ada hubungan terbalik yang konsisten antara tingkat pengangguran dengan upah. Apabila pengangguran tinggi, maka upah meningkat secara perlahan. Sebaliknya, apabila upah naik dengan cepat ketika pengangguran rendah. Hal tersebut diduga oleh sensitivitas pasar tenaga kerja ketika tingkat pengangguran rendah. Pada situasi tersebut, perusahaan berusaha keras untuk menaikkan upah guna menarik tenaga kerja yang langka. Namun, ketika dalam situasi tingkat penganggurannya tinggi, maka tekanan akan berkurang⁷². Selain itu, stabilitas harga dan kesempatan kerja tidak bisa terjadi secara bersama-sama. Yang dapat diartikan bahwa apabila ingin berada di situasi yang penganggurannya rendah atau kesempatan kerja yang tinggi, sebagai akibatnya harus menanggung adanya beban inflasi.

b. Teori Neo Klasik

Dalam teori neo klasik dijelaskan bahwa karyawan memperoleh upah setara dengan nilai marginalnya, atau dalam hal ini upah mempunyai fungsi sebagai imbalan atas kinerjanya yang didapat dari

⁷¹ Nurdin Batjo dan Mahadin Shaleh, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Makassar : Aksara Timur, 2018), hal.89-92

⁷² Priyono dan Zainuddin Ismail, *Teori Ekonomi*, (Surabaya : Dharma Ilmu, 2012), hal. 439

pengusaha yang membayar pekerja tersebut⁷³. Analisis Neo Klasik yang dipaparkan oleh Alfred Marshall permintaan (utilitas) dan penawaran (biaya produksi) tenaga kerja. Dalam teori ini juga dikatakan bahwa pengangguran adalah tanda-tanda ketidakseimbangan, sementara dalam pemakaian tenaga kerja penuh dianggap perekonomian dalam keadaan yang seimbang

c. Teori Keynes

Terkait dengan ketidakseimbangan pengangguran merupakan konsep upah ketat dan tidak fleksibel. Menurutnya, *supply* tenaga kerja yang berlebihan dapat berpengaruh terhadap tingkat upah yang ada menjadi variabel tertentu (eksogen). Perlakuan upah dalam ekonomi makro dapat membawa faktor nonekonomi dalam menentukan tingkat upah seperti adanya kekuatan serikat pekerja dan manajemen.⁷⁴

4. Upah Menurut Ekonomi Islam

Pembalasan atas suatu pekerjaan dari majikan kepada pekerjanya atas kontribusinya terhadap kegiatan produksi adalah upah. Upah atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai *al-ujrah*. Ditinjau dari bahasa *al-ujru* artinya *iwad* (ganti), oleh karena itu *al-sawah* (pahala) diberi nama juga *al-ajru* atau *al-ujrah* (upah). Yang didefinisikan sebagai memberikan

⁷³ Lora Ekana Nainggolan dkk, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), hal. 36

⁷⁴ Sutasyilie Soemitra Remi et al, *Mobilitas Penduduk dan Bonus Demografi*.....hal.51

balasan jasa yang disediakan sebagai pengembalian terhadap kegunaan suatu pekerjaan⁷⁵.

Seperti halnya dalam ekonomi konvensional, upah dalam islam juga dinilai sebagai penerimaan berupa uang atas pekerjaan yang diselesaikannya secara nyata dalam jangka waktu tertentu, semisalnya sebulan, seminggu atau sehari⁷⁶. Berkaitan dengan pembahasan upah, Islam menekankan pada ketidakadanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Baik dari pihak pekerja dan majikannya sama-sama terpenuhi kepentingannya dan mendapatkan bagiannya secara adil serta sah. Hal inipun diatur dalam Al Qur'an

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya(Q.S Al Baqarah : 279)⁷⁷

Diterangkan dalam ayat tersebut bahwa kontrak mengenai upah bagi kedua belah pihak harus dilandaskan pada sikap yang jujur dan adil , karena masing-masing pihak saling membutuhkan untuk memenuhi kepentingannya. Sehingga, apabila kedua sikap tersebut diterapkan dengan benar, maka tidak akan terjadi tindakan aniaya yang dapat

⁷⁵ Ruslan Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Sukabumi : Arjasa Pratama, 2020), hal. 7

⁷⁶ *Ibid*, hal.7

⁷⁷ Naf'an Akhun, *Al Qur'an Terjemahan Depag PDF Interactive v201905*, (Semarang : CV Toha Putra, 2019), hal.57

merugikan keperluannya sendiri. Apalagi dalam pandangan Islam , sistem pengupahan memiliki prinsip adil dan layak. Prinsip adil ini dapat diartikan berbagai macam, mulai dari upah harus jelas dan transparan sampai adil itu proporsional. Demikian pula layak juga dapat diartikan sebagai upah layak untuk memenuhi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), serta layak karena memenuhi standar harga pasar tenaga kerja⁷⁸.

D. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara ialah pertumbuhan ekonomi. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat sejauh mana negara tersebut mengalami perkembangan dari aktivitas perekonomian dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sendiri diartikan sebagai suatu fase dimana perekonomian mengalami kemajuan atau perkembangan yang lebih baik secara persisten dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, kenaikan produktifitas baik barang maupun jasa yang tergambar dalam pendapatan nasional yang bertambah, dapat didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi⁷⁹.

2. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

⁷⁸ *Ibid*, hal. 11-19.

⁷⁹ Irma Yuliani, *Pengaruh Belanja dan Investasi Terhadap Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal.23

Berikut ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi dari berbagai ahli⁸⁰ :

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Dalam sudut perspektif para ahli ekonomi klasik , pertumbuhan ekonomi dipengaruhi 4 variabel diantaranya jumlah penduduk, stok modal, luas tanah dan kekayaan. Walaupun demikian, pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi titik utama yang menjadi sorotan dari ahli ekonomi klasik.

b. Teori Schumpeter

Berbeda dengan teori ekonomi klasik yang menitikberatkan jumlah penduduk yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Schumpeter menitikberatkan vitalnya peran pengusaha dalam perekonomian. Dikarenakan pengusaha akan secara *kontinu* terus melakukan inovasi atau pembaruan guna menjaga eksistensi produk yang dimilikinya. Untuk melakukan macam-macam inovasi seperti mengenalkan barang yang belum ada sebelumnya, pemakaian proses produksi secara efisien, melakukan ekspansi pemasaran baru, mengembangkan sumber daya mentah dan lain-lain, dibutuhkanlah investasi. Dengan investasi, maka akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi

c. Teori Harrod-Damar

Teori Harrod Damar memiliki pandangan yang berbeda pula dengan 2 ahli ekonomi sebelumnya. Berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi , agar mencapai pertumbuhan yang teguh

⁸⁰ Sadorno Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Press ,2011), hal. 433-437

(*steady growth*) menyebutkan bahwa perekonomian harus memenuhi beberapa syarat berikut ini : (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan adalah seimbang dengan pendapatan nasional, (3) rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap nilainya, serta (4) perekonomian terbagi menjadi 2 sektor yaitu rumah tangga dan perusahaan

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut ahli ekonomi Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Abrahamovits dan Solow pertumbuhan ekonomi bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Dengan beranggapan, bahwa kemajuan IPTEK dan peningkatan keahlian dan skill tenaga kerja menjadi variabel yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Bukan malah penambahan barang modal dan peningkatan sumber daya manusianya.⁸¹

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan ekonomi

- a. Investasi
- b. Tanah dan Kekayaan Alam
- c. Jumlah dan kualitas dari penduduk dan tenaga kerja
- d. Barang modal dan teknologi
- e. Sistem sosial dan sikap masyarakat⁸²

4. Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB)

⁸¹ *Ibid*, hal.437

⁸² Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia : Tinjauan Historis, teoritis, dan empiris*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 64

Dalam suatu wilayah, kegiatan ekonomi dapat dihitung menggunakan pendapatan regional atau produk domestik regional bruto (PDRB). Atau dapat dikatakan bahwa PDRB ialah alat atau paramater dari kegiatan ekonomi suatu wilayah. Hasil akumulasi unit ekonomi suatu wilayah dari nilai barang dan jasa (output) dalam jangka waktu tertentu. Semakin tinggi jumlah output yang yang diciptakan , maka semakin tinggi pula kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut⁸³. PDRB sangat berkaitan erat dengan potensi dan pengolahan sumber daya yang dipunyai oleh daerah tersebut. Bagaimana daerah tersebut dapat mengoptimalkannya dalam kegiatan ekonomi yang berlangsung di daerah tersebut⁸⁴.

Di Indonesia terdapat 2 jenis PDRB yang diberlakukan, yaitu PDRB atas atas dasar harga berlaku (nominal) dan PDRB atas dasar harga konstan (riil). Di mana keduanya masing-masing mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan perhitungan nilai tambah barang dan jasa menggunakan harga berlaku pada tahun tersebut dan dilakukan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, PDRB ini digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi wilayah, pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya, PDRB atas harga konstan merupakan perhitungan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dalam suatu waktu tertentu sebagai tahun acuan (tidak ada

⁸³ Yogi, dkk, *Pengantar Ekonomika Wilayah : Pendekatan Analisis Praktis*, (Bandung : Penerbit ITB, 2018), hal. 11

⁸⁴ Zaenal Abidin dan Abdul Wahed, *KYAI & EKONOMI : Dialektika Ahli & Praktisi Ekonomi Islam di Madura*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2016), hal. 7

pengaruh inflasi). Maka dari itu, PDRB ini berguna untuk melihat pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun (laju pertumbuhan ekonominya)⁸⁵.

Menurut Sumodiningrat, PDRB dapat dihitung melalui 3 pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran⁸⁶. Pendekatan produksi merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menghitung PDRB dalam tingkat kabupaten atau kota. Selain pendekatan tersebut, dalam perhitungan PDRB juga memperhatikan semua sektor lapangan usaha yang terbagi dalam 9 sektor sebagai berikut : (a) sektor pertanian, (b) sektor pertambangan dan penggalan, (c) sektor industri pengolahan, (d) sektor listrik, gas, dan air minum, (e) sektor bangunan, (f) sektor perdagangan, hotel dan restoran, (g) sektor angkutan dan komunikasi, (h) sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah tangga dan jasa perusahaan, (i) sektor pemerintahan dan jasa⁸⁷.

5. Pertumbuhan ekonomi dalam Islam

Dalam perspektif Islam, pertumbuhan ekonomi dikategorikan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri didefinisikan sebagai *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* (pertumbuhan terus menerus dari faktor-faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi untuk

⁸⁵ R. Widodo Dwi Pramono dan Ratna Eka Suminar, *Ekonomi Wilayah Untuk Perencanaan Tata Ruang*, (Yogyakarta : Deepublish Publisher, 2019), hal. 42

⁸⁶ Yogi dkk, *Pengantar Ekonomika Wilayah*hal. 12

⁸⁷ Hessel Nogi S. Tangkisilin, *Manajemen Publik*, (Jakarta : PT Grafindo, 2006), hal.90-91

kesejahteraan manusia)⁸⁸. Kesejahteraan disini tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan dalam bentuk material saja, melainkan menekankan aspek rohaniyah juga. Distribusi pertumbuhan ekonomi menjadi poin penting dalam pertumbuhan ekonomi Islam. Situasi di mana ketika pertumbuhan ekonomi yang rendah dengan distribusi pendapat lebih bagus, apabila dikomparasikan pertumbuhan yang tinggi, namun tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang merata⁸⁹.

Islam dengan tegas menolak adanya konsentrasi kekayaan yang hanya dinikmati oleh segelintir orang, maka dari itu terciptalah konsep zakat, infak, sedekah, wakaf dan institusi lainnya, seperti *pajak, jizyah, dharibah* dan lain-lain. Dalam Firmannya Allah SWT yang menggambarkan bahwa tujuan pertumbuhan ekonomi dalam sudut pandang Islam ialah mengutamakan penanganan kemiskinan dan mengurangi pengangguran⁹⁰.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al Hasyr 59 : 7)⁹¹

⁸⁸ Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), hal. 205

⁸⁹ *Ibid*, hal. 213

⁹⁰ Veitzhal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 177-178

⁹¹ Naf'an Akhun, *Al Qur'an Terjemahan Depag PDF Interactive v201905*, (Semarang : CV Toha Putra, 2019), hal.906

Dalam Islam pemerataan dan pertumbuhan ekonomi satu kesatuan. Pertumbuhan ekonomi merupakan pemerataan itu sendiri. Ciri khas dari pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi Islam terletak pada titik prioritas pada pengembangan sumberdaya manusia dengan pemberdayaan sumber daya alam , guna meningkatkan harkat dan martabat manusia yang tidak hanya terwujud dalam dunia saja, namun juga kehidupan akhirat⁹².

E. Indeks Pembangunan Manusia

1. Pengertian Indeks Pembangunan Manusia

Dalam suatu negara, manusia memiliki peran yang vital untuk mendorong berhasil atau tidaknya upaya negara untuk memajukan negaranya. Salah satu cara yang dapat dilakukan melalui proses pembangunan manusia. Dibangun disini berarti ditempa untuk menjadikan manusia itu unggul dalam segi jumlahnya, tetapi juga dengan mutunya, keahlian dan keterampilannya. Bagaimana si manusia tadi dapat memiliki kesehatan, pengetahuan dan kehidupan yang pantas⁹³.

Dalam kamus istilah ilmiah, untuk mengukur kemajuan yang telah dilakukan oleh suatu daerah, digunakanlah Indeks Pembangunan Manusia. Kemajuan berarti program pembangunan membawa perubahan atas kehidupan manusia, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

⁹² Mohammad H. Holle, *Bunga Rampai Studi Ekonomi Syariah*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2020), hal. 222

⁹³ Mohammad Abdul Ghani, *Model CS Berbasis Komputer –Integrasi Penerapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Korporasi*, (Bogor : PT Penerbit IPB Press,2016), hal.47

UNDP lah yang untuk pertama kalinya di tahun 1990, mengenalkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sebagai alat yang dipakai untuk mengukur kebijakan suatu daerah atas kualitas hidup masyarakat, apakah termasuk yang telah maju atau terbelakang, yang stagnan ataupun mengalami perkembangan, selain itu juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup⁹⁴. Menurut Todaro, indeks pembangunan manusia (*Human Development Index*) adalah barometer untuk mengukur pencapaian sosioekonomi suatu negara dengan menggabungkan antara aspek kesehatan, pendidikan dan juga pendapatan sesungguhnya per kapita yang telah disesuaikan⁹⁵.

IPM sendiri digolongkan menjadi beberapa tingkatan yaitu mulai tingkat rendah, sedang, tinggi, hingga sampai tinggi. Penggolongan ini dimaksudkan untuk melihat pencapaian IPM bagi daerah satu dengan daerah lainnya. Golongan pertama, IPM dikatakan rendah apabila kurang dari 60. Golongan kedua, IPM dikatakan sedang apabila $60 < \text{IPM} < 70$. Golongan yang ketiga, IPM termasuk tinggi apabila $70 < \text{IPM} < 80$. Dan golongan yang terakhir, IPM dikategorikan sangat tinggi apabila > 80 ⁹⁶.

2. Dimensi- Dimensi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia mencakup 3 dimensi untuk menghitungnya meliputi⁹⁷ :

⁹⁴ *Ibid*, hal. 47

⁹⁵ Rossanto Dwi Handoyo, “Ekonomi Sumber Daya Manusia” dalam <https://www.pustaka.ut.ac.id>, diakses 16 November 2020

⁹⁶ Yusniah Anggraini, *Kebijakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia*, (Jakarta : INDOCAMP), hal.16

⁹⁷ *Ibid*, hal. 9

- a. Angka harapan hidup yang digunakan untuk mengukur umur panjang (*longevity*) dan hidup sehat

Indikator harapan hidup ialah angka kematian bayi, penduduk yang diestimasikan mencapai usia 40 tahun, presentase penduduk dengan keluhan kesehatan, presentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri, presentase kelahitan yang ditolong oleh tenaga medis , presentase balita yang kekurangan gizi dan lain-lain

- b. Angka harapan sekolah dan angka rata lama-lama sekolah digunakan untuk mengukur pengetahuan

Indikator pendidikan ini ialah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan angka putus sekolah “*Drop Out*” dan lain sebagainya

- c. Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita yang digunakan untuk mengukur standar hidup layak

Indikator standar hidup layak ini terdiri atas jumlah yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah dan presentase penduduk miskin dan PDRB riil per kapita⁹⁸.

Mengenai cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu pembangunan yang dilakukan oleh daerah, pada tahun 2010 tepatnya indikator IPM mengalami perubahan. Perubahan ini dilatarbelakangi karena cara yang sebelumnya dianggap tidak efektif lagi digunakan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan ada perbandingan IPM dengan

⁹⁸ *Ibid*, hal.11-14

metode lama (sebelum tahun 2010), dibandingkan dengan metode baru (setelah tahun 2010)⁹⁹

Tabel 2. 1 Metode Perhitungan IPM

Metode Lama (sebelum 2010)		Metode Baru (Setelah 2010)	
Dimensi	Indikator	Dimensi	Indikator
Umur panjang dan hidup sehat	Angka Harapan Hidup	Umur panjang dan hidup sehat	Angka harapan hidup
Pendidikan dan pengetahuan	Angka melek huruf dan rasio kombinasi partisipasi kotor primer, sekunder dan tersier	Pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah
Stadar hidup layak	Produk Domestik Bruto	Standar Hidup Layak	Produk Nasional (PNB) per kapita

Berdasarkan tabel diatas, jelas tergambar perubahan cara pra dan pasaca tahun 2010. Cara baru yang digunakan sebagai indikator IPM antara lain ialah angka harapan lama sekolah, menggantikan angka melek huruf yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pendidikan sekarang ini. Kemudian,

⁹⁹ *Ibid*, hal.18

penggunaan produk nasional bruto (PNB) per kapita untuk menggantikan Produk Domestik Bruto. Lebih lanjut lagi, perubahan juga terjadi dengan rata-rata geometrik yang dipakai untuk menghitung IPM. Perubahan ini diharapkan, supaya hasil yang diperoleh bisa lebih akurat.¹⁰⁰

3. Indeks Pembangunan Manusia dalam Islam

Pandangan pembangunan ekonomi konvensional dengan pandangan ekonomi Islam memiliki perbedaan yang cukup berarti. Yang mana pembangunan ekonomi dipandang Islam lebih luas, bukan hanya menyangkut material saja. Namun, juga menekankan pembangunan dalam aspek spiritual dan moral. Kembali lagi bahwa orientasi ekonomi Islam adalah kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat yang berpedoman Al Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu, Islam menyoroti permasalahan pembangunan ekonomi, dengan menempatkannya pada permasalahan pembangunan yang utama yaitu pembangunan umat manusia sebagai subyek pembangunan itu sendiri¹⁰¹.

Melihat perbedaan pandangan tersebut, tentu saja barometer untuk menghitung indeks pembangunan manusia berbeda. *I-HDI (Islamic Human Development Index)* atau Indeks Pembangunan Manusia Islami merupakan piranti yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam. *I-HDI* sendiri dipergunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan manusia yang dicapai, yang mana keperluan

¹⁰⁰ Badan Pusat Statistik Indonesia, “*Indeks Pembangunan Manusia*” dalam <https://www.bps.go.id/subject/36/indeks-pembangunan-manusia.html>, diakses 21 Juni 2020

¹⁰¹ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta : KENCANA, 2017), hal.20

dasar hidupnya telah sepenuhnya tercukupi , supaya manusia dapat bahagia baik ukhrawi maupun akhiratnya (mencapai falah).¹⁰²

Dalam penelitiannya, Hendri Anto MB menerangkan bahwa indikator I-HDI mengambil konsep *Maqashid Syariah* Al Ghazali yang sebagai tambahan aspek pengukuran indeks pembangunan manusia. *Maqashid Syariah* bermaksud melindungi *Hifdzu Din* (keimanan), *Hifdzu An-Nafs* (jiwa), *Hifdzu Al-Aql* (akal), *Hifdzu An-Nasl* (keturunan) , dan *Hifdzu Al Maal* (harta) . Ditambah pula I-HDI mengelompokkan kesejahteraan menjadi 2 jenis yaitu kesejahteraan material (*material welfare*) dan kesejahteraan non material (*non material welfare*)¹⁰³. Seperti yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut ¹⁰⁴:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An Nisa : 9)

Ayat diatas menggambarkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dibutuhkan kejujuran dan peningkatan ketaqwaan seorang hamba kepada Allah SWT dan membantu masyarakat yang kesusahan.

Hampir sama dengan indeks pembangunan konvensional yang terbagi

¹⁰² Rizky Rahmatullah, *Islamic Human Development Index Di Kawasan Eksplorasi Tambang Batu Di Batu Sopang Kalimantan Timur*, (Yogyakarta : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), hal.31

¹⁰³ Rukiah, dkk, *Islamic Human Development Index Di Indonesia (Suatu Pendekatan Maqashid Syariah)* , Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam. Vol 18 No.2 Tahun 2019 : Desember, hal.347-367

¹⁰⁴ Naf'an Akhun, *Al Qur'an Terjemahan Depag PDF Interactive v201905*, (Semarang : CV Toha Putra, 2019), hal.117

menjadi 3 dimensi yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Terdapat penambahan komponen I-HDI yaitu tingkat religiusitas pada aspek *Hifdzu Din* yang diwakili oleh tingkat persepsi korupsi ataupun tingkat kriminalitas dalam suatu wilayah. Demikian dengan adanya *I-HDI* tersebut, dapat dipergunakan sebagai kontribusi pengembangan konsep indeks pembangunan manusia, teruntuk bagi negara yang berpenduduk mayoritas islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dengan merujuk pada penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya, berikut ini beberapa referensi penelitian terdahulu yang digunakan untuk menyusun penelitian ini :

1. Faktor-faktor Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014 oleh Yunani Tiya Kasanah , Anifatul Hanim, Edi Suswandi

Jurnal penelitian Yunani dkk tersebut merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan sumber datanya berasal dari data Badan Pusat Statistik (data sekunder). Dengan metode regresi data panel sebagai metode analisis serta menggunakan pendekatan fixed effect model (FEM). Hasil dari jurnal penelitian tersebut adalah variabel upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah, variabel angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Jawa Tengah, serta variabel pertumbuhan

ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka Jawa Tengah tahun 2009-2014¹⁰⁵.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah adanya 3 variabel bebas yang diteliti yaitu variabel upah minimum kabupaten/kota, angkatan kerja, PDRB (pertumbuhan ekonomi). Persamaan lainnya adalah penggunaan metode regresi data panel sebagai cara untuk mencari pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sementara perbedaannya terletak variabel bebas indeks pembangunan manusia tidak diteliti oleh Yunani, Anifatul dan Edi. Selain itu juga variabel terikatnya adalah pengangguran terbuka daerah Provinsi Jawa Tengah dengan jangka waktu yang cukup lama mulai dari tahun 2009- 2014.

2. Pengaruh Angkatan Kerja Bekerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Sulawesi Utara oleh Yunita Bella David, Daisy S.M Engka, Jacline I.Sumual

Penelitian Yunita dkk menggunakan metode analisis regresi berganda dengan tujuan untuk menganalisis hubungan variabel angkatan kerja bekerja dan jumlah penduduk terhadap Pengangguran Di Sulawesi Utara dalam jangka waktu mulai dari tahun 2003-2017. Hasil penelitian dari penelitian tersebut ialah variabel angkatan kerja bekerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran dan variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat

¹⁰⁵ Yunani Tiya Kasanah , Anifatul Hanim, Edi Suswandi, *Faktor-faktor Mempengaruhi Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2014*, e-journal Ekonomi Bisnis dan Akutansi Volume V(1) tahun 2018 ISSN : 2355- 4665, hal.21-25

pengangguran Di Sulawesi Utara.

Persamaan dengan penelitian Yunita dkk adalah variabel angkatan kerja bekerja terhadap tingkat pengangguran. Perbedaannya penelitian tersebut hanya menganalisis 2 variabel bebas saja, sedangkan penelitian ini menggunakan 4 variabel bebas dalam periode waktu 2013-2019. Penelitian ini mengambil tempat penelitian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur , sementara penelitian tersebut mengambil tempat Sulawesi Utara dalam jangka waktu 2003-2017.¹⁰⁶

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya oleh Moch Heru Anggoro dan Yoyok Soesatyo

Jurnal Penelitian Heru dan Yoyok menggunakan jenis penelitian ekplanasi asosiatif. Penelitian eksplanasi asosiatif merupakan penelitian yang menjelaskan kedudukan masing-masing variabel yang diteliti serta pengaruhnya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Dengan tujuan untuk menguji hubungan variabel pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Surabaya. Hasil penelitiannya yaitu variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan terbalik (negatif) terhadap tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya dan variabel pertumbuhan angkatan

¹⁰⁶ Yunita Bella David, Daisy S.M Engka, Jacline I.Sumual, *Pengaruh Angkatan Kerja Bekerja Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Sulawesi Utara*, jurnal EMBA Vol.7 8 Juli tahun 2019 ISSN 2303-1774, hal.3389-3398

kerja tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka Kota Surabaya¹⁰⁷..

Perbedaan penelitian ini dengan dengan jurnal penelitian Heru Dan Yoyok tersebut adalah variabel bebas yang dianalisis hanya dua, sementara dalam penelitian ini ada 4 variabel bebas. Metode yang digunakan juga berbeda penelitian ini menggunakan metode regresi panel, tetapi jurnal penelitian Heru dan Yoyok menggunakan metode analisis regresi berganda biasa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup semua kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2013-2019, sedangkan penelitian diatas hanya Kota Surabaya saja dalam jangka waktu tahun 2004-2013. Persamaannya yaitu variabel angkatan kerja yang sama-sama diujikan pengaruhnya terhadap pengangguran terbuka

4. Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 oleh Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk

Jurnal penelitian diatas menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh variabel Inflasi, PDRB, Dan UMK terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Data yang digunakan adalah data sekunder , dengan jumlah sampel ialah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya

¹⁰⁷ Moch Heru Anggoro dan Yoyok Soesatyo, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kota Surabaya*, ejournal UNESA volume 3 Nomor 3 Tahun 2015, hal.1-13

menunjukkan bahwa variabel inflasi dan UMK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. Sedangkan variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019¹⁰⁸.

Perbedaan jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jangka waktu yang diteliti lebih pendek yaitu hanya 3 tahun mulai dari tahun 2017-2019 dengan jumlah sampel sebanyak 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut lagi, variabel angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia tidak diteliti dalam jurnal tersebut. Persamaannya yaitu sama-sama menguji pengaruh variabel PDRB dan UMK , serta sama-sama menggunakan jenis data sekunder.

5. Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran oleh Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo

Jurnal penelitian diatas mempunyai tujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu tingkat pengangguran terbuka se-Karesidenan Surakarta . Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode regresi data panel dengan jangka waktu 15 tahun mulai dari tahun 1999-2013 . Pendekatan yang tepat untuk analisis tersebut ialah *fixed effect model* (FEM). Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa variabel upah minimum , PDRB , inflasi, jumlah penduduk bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Se-Karisidenan

¹⁰⁸ Ahmad Ulil Albab Al Umar dkk, *Pengaruh Inflasi, PDRB, Dan UMK Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019*, Jurnal Ekonomi Vol.16 Nomor 1 Juni 2020 p-ISSN : 1858-2192-e-ISSN : 2686-5467, hal.1-12

Surakarta. Sementara secara sendiri-sendiri , variabel upah minimum dan jumlah minimum mempunyai pengaruh positif signifikan, sedangkan PDRB mempunyai pengaruh negatif signifikan, serta inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran Se-Karisidenan Surakarta¹⁰⁹.

Perbedaan jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jumlah variabel bebas yang diujikan terhadap tingkat pengangguran tidak mengikutsertakan variabel angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia, disisi lain jumlah penduduk dan inflasi diujikan dalam jurnal penelitian diatas. Kemudian jangka waktunya, apabila penelitian ini meneliti mulai dari tahun 2013-2019, sedangkan yang jurnal penelitian diatas meneliti dari tahun 1999-2013. Persamaannya sama-sama menggunakan regresi data panel dan menggunakan data sekunder.

6. Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Di Kalimantan Barat oleh Mochamad Rofik, Novi Puji Lestari dan Rizkia Septianda

Jurnal penelitian diatas mempunyai tujuan untuk menganalisis karakteristik dan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kenaikan upah minimum terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Jenis penelitian dari jurnal tersebut adalah penelitian kuantitatif-kualitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel dalam jangka waktu dari tahun 2011-2015. Yang mana dalam jangka waktu tersebut, *trend* pengangguran

¹⁰⁹ Jihad Lukis Panjawa dan Daryono Soebagiyo, *Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 15 Nomor 1 April 2016, hal 48-54

Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa secara parsial variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dan variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap pengangguran di Kalimantan Barat. Sementara berdasarkan uji f, kedua variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kalimantan Barat dengan nilai probabilitas $0,00000 < 0,5$ (kurang dari alfa)¹¹⁰.

Perbedaan jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jumlah variabel bebas yang diujikan terhadap tingkat pengangguran tidak menguji variabel angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia. Kemudian wilayah dan jangka waktu yang diteliti juga berbeda. Jika jurnal penelitian diatas wilayah adalah Kalimantan Barat, sementara dalam penelitian ini adalah kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut lagi, jangka waktu jurnal penelitian dimulai dari tahun 2011-2015, sedangkan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2013-2019. Persamaannya sama-sama menguji variabel upah minimum dan pertumbuhan ekonomi, sama-sama menggunakan data sekunder dan teknik analisisnya menggunakan analisis regresi data panel.

7. Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di D.I Yogyakarta oleh Joko Susanto dan Muhammad Arsyah Wildan Pratama

Jurnal penelitian diatas mempunyai tujuan untuk mengetahui

¹¹⁰ Mochamad Rofik, Novi Puji Lestari dan Rizkia Septianda, *Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Di Kalimantan Barat*, Jurnal Inovasi Ekonomi Vol.03 No.02 September 2018 P-ISSN : 2477- 4804, hal.45-52

determinasi pengangguran terbuka di D.I Yogyakarta , dengan data yang digunakan adalah data sekunder. Data yang digunakan meliputi tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, UMK, dan modal manusia dari tahun 2010-2018. Dalam menguji determinasi dari variabel-variabel tersebut, digunakanlah analisis regresi data panel berdasarkan *Fully Modified Ordinary Least Square (FMOLS)* dan *Dynamic Ordinary Least Square*. Hasil analisis dalam jurnal tersebut adalah variabel UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka D.I Yogyakarta , variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka D.I Yogyakarta , serta modal manusia tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap terhadap tingkat pengangguran terbuka D.I Yogyakarta¹¹¹ .

Persamaan jurnal diatas dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data sekunder dengan metode analisisnya adalah model regresi data panel. Beberapa variabel yang dianalisis juga sama dengan penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi, UMK dan modal manusia. Sementara perbedaannya terletak pada jangka waktunya , penelitian ini menganalisis dari tahun 2013-2019, sementara jurnal diatas dari tahun 2010-2018. Selain itu, subyek yang diteliti dalam jurnal diatas D.I Yogyakarta bukan Jawa Timur , lebih lanjut lagi variabel angkatan kerja tidak diikutsertakan dalam jurnal penelitian diatas.

8. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan

¹¹¹ Joko Susanto dan Muhammad Arsyah Wildan Pratama, *Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di D.I Yogyakarta*, Ejournal Unitomo tahun 2020, hal. 1-17

Produk Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 oleh Trianggono Budi Hartono dan Siti Umajah Masjkuri

Jurnal penelitian diatas mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah penduduk, upah minimum, dan PDRB terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Teknik yang digunakan untuk melakukan analisis ialah metode regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect model* . Data yang digunakan data sekunder dalam jangka waktu tahun 2010-2014. Hasil analisis dalam jurnal tersebut dapat diketahui variabel jumlah penduduk, pendidikan, PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan dan ke arah positif jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Sementara, variabel upah minimum menunjukkan arah negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Namun secara parsial, semua variabel yang dianalisis dalam jurnal diatas mempengaruhi jumlah pengangguran di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur secara signifikan dengan probabilitas $0,0000 < 0,1\%$ (signifikansi)¹¹².

Persamaan jurnal diatas dan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data sekunder dengan metode analisisnya adalah model regresi data panel . Beberapa variabel yang dianalisis juga sama dengan

¹¹² Trianggono Budi Hartono dan Siti Umajah Masjkuri, *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Upah Minimum dan Produk Domestik Bruto (PDRB) Terhadap Jumlah Pengangguran Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014*, Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Vol 02(1) tahun 2017, hal.21-30

penelitian ini, seperti PDRB dan upah minimum. Selain itu, subyek yang diteliti dalam jurnal diatas juga sama-sama kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Sementara perbedaannya terletak pada jangka waktunya , penelitian ini menganalisis dari tahun 2013-2019, sementara jurnal diatas dari tahun 2010-2014. Lebih lanjut lagi variabel angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia tidak diikutsertakan dalam jurnal penelitian diatas.

9. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta oleh Putri Romhadhoni, Dita Zamrotul Faizah, Nadia Afifah

Jurnal penelitian diatas mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terdiri dari PDRB atas harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta serta pengaruh tidak langsung PDRB atas harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta, dengan metode analisis jalur (*path analysis*). Data didapat dari publikasi Badan Pusat Statistik DKI Jakarta dari tahun 2013-2015. Hasil penelitiannya yaitu PDRB atas harga konstan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka. PDRB atas dasar harga berlaku tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan

ekonomi bukan merupakan variabel mediasi dalam PDRB harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku terhadap tingkat pengangguran terbuka.¹¹³

Persamaan jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan data sekunder dan menguji pengaruh PDRB harga konstan terhadap tingkat pengangguran terbuka . Sementara perbedaannya terletak pada penggunaan variabel bebas didalam jurnal diatas tidak hanya diujikan terhadap pengangguran terbuka, melainkan pula terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta dalam periode mulai tahun 2013-2015. Selain itu metode yang digunakan dalam jurnal diatas adalah analisis jalur, sedangkan penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

10. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat oleh M.Arizal dan Arwan

Jurnal penelitian diatas termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif dan asosiatif dimana tujuannya untuk menguji pengaruh antara variabel PDRB dan IPM terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat. Pada penelitian ini dibahas seberapa besar pengaruh variabel bebas dengan terikat menggunakan analisis regresi panel dan menggunakan metode *Fixed Effect Model*. Data yang digunakan adalah TPT 19 kab/kota, PDRB Perkapita ADHK 19 kab/kota 2010, dan

¹¹³ Putri Romhadhoni, Dita Zamrotul Faizah, Nadia Afifah, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi DKI Jakarta*, Jurnal Matematika Integratif Vol.14 No.2 tahun 2018 ISSN 1412-6184 e-ISSN:2549-903, hal. 115-121

IPM 19 kab/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2017. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian diatas adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Sumatera Barat¹¹⁴.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan jurnal diatas terletak pada variabel bebas yang diujikan, variabel bebas dalam jurnal penelitian diatas hanya ada 2. Sementara dalam penelitian ini ada 4 variabel bebas yang diujikan terdiri atas angkatan kerja, UMK, PDRB dan IPM. Sampel yang digunakan dalam jurnal penelitian ini lebih sedikit yaitu 19 kabupaten/kota , tetapi periode penelitian panjang dari tahun 2010-2017. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode regresi data panel dan sumber datanya berasal dari BPS (data sekunder).

11. Pengaruh PDRB, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011 oleh Tengkoeh SariMuda RB dan Soekarnoto

Jurnal Penelitian diatas menggunakan metode penelitian yang digunakan yakni analisis regresi data panel dengan memakai data sekunder dengan periode waktu selama 4 tahun, dari tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian, variabel PDRB mempunyai hubungan berbanding terbalik dan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Kemudian, variabel UMK memiliki asosiasi negatif dan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka.

¹¹⁴ M.Arizal dan Arwan ,*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sumatera Barat*, Ejournal UNP Volume 2 Nomor 3 5 September 2019, hal. 433- 442

Variabel Inflasi memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Selanjutnya, variabel investasi memiliki hubungan negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka di kab/kota di Provinsi Jawa Timur¹¹⁵.

Persamaan antara jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini ialah variabel bebas PDRB sama-sama diujikan apakah memiliki pengaruh terhadap pengangguran terbuka kab/kota di Provinsi Jawa Timur. Perbedaannya, variabel yang diuji dalam penelitian ini jauh lebih banyak dibandingkan jurnal penelitian diatas yaitu variabel angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia yang tidak diujikan dalam jurnal penelitian tersebut. Jangka waktu penelitian ini juga mulai dari tahun 2013-2019, sedangkan jurnal penelitian diatas dari tahun 2007-2011.

12. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh oleh Riska Garnella, Nazaruddin A.Wahid, Yulindawati Yulindawati

Jurnal penelitian diatas menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh terbuka tahun 2011-2018. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik Aceh dengan jumlah sampelnya 10 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Metode analisis regresi data panel yang digunakan

¹¹⁵ Tengkoeh SariMuda RB dan Soekarnoto, *Pengaruh PDRB, Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Kab/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2007-2011*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun XXIV No.2 Agustus 2014, hal.106-119

sebagai alat analisis dengan pendekatan *fixed effect model (FEM)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan IPM berpengaruh signifikan dan negatif, sementara variabel kemiskinan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran terbuka Di Provinsi Aceh¹¹⁶.

Perbedaan jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jumlah sampel yang diambil hanya 10 kabupaten/kota di Aceh tetapi jangka waktunya lebih panjang mulai dari tahun 2011-2018. Ditambah lagi, jurnal penelitian diatas tidak menganalisis variabel angkatan kerja dan UMK, tetapi memasukan variabel kemiskinan sebagai salah satu variabel bebas yang mempengaruhi pengangguran. Persamaannya sama-sama menggunakan metode regresi data panel dan sumber datanya sekunder.

13. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014 oleh Muhammad Nurcholis

Penelitian yang dilakukan oleh Nurcholis dalam jurnal diatas berjenis penelitian deskriptif kuantitatif. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui distribusi, klasifikasi dan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan indeks pembangunan manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. Dalam jurnal

¹¹⁶ Riska Garnella, Nazaruddin A.Wahid, Yulindawati Yulindawati, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Kemiskinan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Aceh*, JIMEBIS Volume 1 Nomor 1 Januari – Juni 2020, hal.21-35

penelitian Nurcholis diatas diketahui bahwa metode yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel yang disertai dengan klasifikasi intensitas dan GIS. Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwasannya variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh negatif signifikan, sementara itu indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014. Secara serentak semua variabel berpengaruh signifikan juga¹¹⁷.

Perbedaan jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini adalah jumlah variabel bebas yang diujikan terhadap tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur tidak mengikutsertakan variabel angkatan kerja. Kemudian jangka waktunya, apabila penelitian ini meneliti mulai dari tahun 2013-2019, sedangkan yang jurnal penelitian diatas meneliti dari tahun 2008-2014. Persamaannya sama-sama menggunakan regresi data panel dan menggunakan data sekunder.

14. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten oleh Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah

Dalam jurnal penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mahorji dan Iin Nur Khasanah untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia, upah minimum Kabupaten/Kota dan investasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Dengan memakai cara analisis data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model*. Dengan hasil yang ketiga

¹¹⁷ Muhammad Nurcholis, *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2014*, Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12 No 1 Tahun 2014, hal. 46-57

komponen tersebut mempengaruhi negatif dan signifikan atas pengangguran terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2011-2015¹¹⁸.

Perbedaan jurnal penelitian diatas dengan penelitian ini ialah variabel yang diujikan dalam jurnal diatas meliputi 3 variabel bebas terhadap Provinsi Banten . Jurnal penelitian diatas dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Sementara persamaanya yaitu sama-sama menggunakan variabel bebas indeks pembangunan manusia untuk diuji pengaruhnya terhadap tingkat pengangguran terbuka.

G. Kerangka Konseptual

Bersandarkan atas teori dan penelitian-penelitian terdahulu, bisa dijelaskan jumlah angkatan kerja yang besar dapat diperuntukkan sebagai peluang yang seharusnya bisa digunakan untuk menunjang pembangunan daerah. Semakin banyak penduduk maka akan melimpah pula jumlah angkatan kerja yang dimiliki, sehingga bisa mendorong tingkat produktivitas suatu daerah. Namun, bukan perkara mudah untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut, jumlah angkatan kerja yang banyak ternyata menyebabkan permasalahan yaitu tingkat pengangguran yang meningkat, akibat terjadi ketimpangan antara pertumbuhan kesempatan kerja yang ada, dengan akselerasi angkatan kerja yang terus meningkat melebihi penciptaan lapangan kerja.

¹¹⁸ Dwi Mahroji dan Iin Nurkhasanah, *Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten*, Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Volume 9 No 1 Tahun 2019 ISSN : 2089- 4473e-ISSN: 2541-1314, hal.51-72

Dengan demikian, tingkat pengangguran bisa meningkat. Kemudian, PDRB sebagai cerminan kemajuan perekonomian suatu daerah Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai dari total barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun dalam suatu wilayah tertentu tanpa pemisahan antara faktor produksi. Berarti bahwa PDRB yang tinggi membawa pengaruh ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi pula, sehingga tingkat pengangguran bisa ditekan.

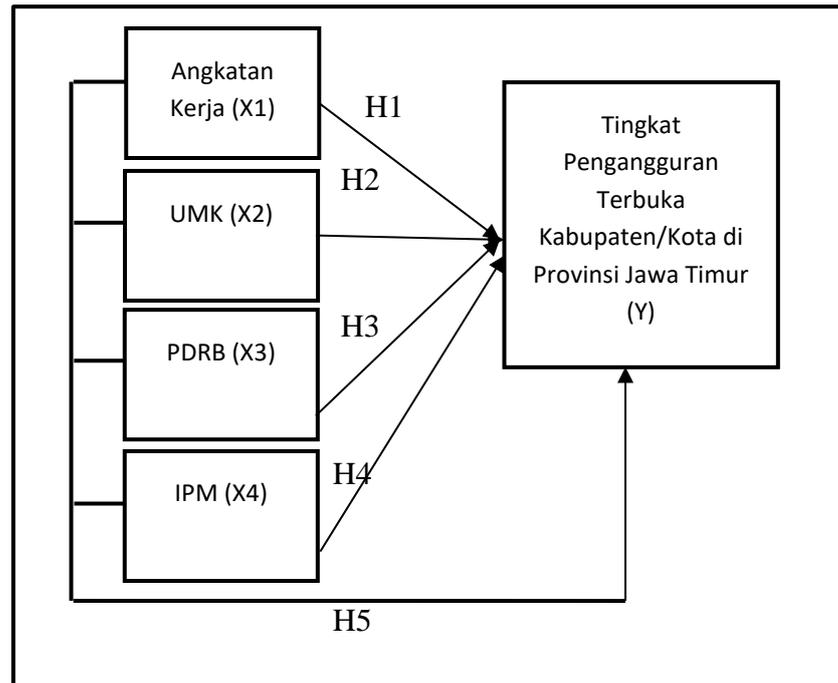
Adapun Marhaeni dan Manuati memaparkan bahwasannya tingkat upah dapat berpengaruh besar terhadap situasi ketenagakerjaan, penggunaan teknologi menyebabkan pengurangan penggunaan jasa tenaga kerja, fasilitas modal yang dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja dan struktur perekonomian yang dapat menimbulkan penurunan permintaan kerja.¹¹⁹

Kemudian, berkaitan dengan pembangunan manusia dapat dilihat dari indeks pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia berperan sebagai cerminan keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Yang dapat ditandai dengan kesejahteraan, kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat yang menjadi meningkat. Lebih jauh lagi tujuan pembangunan manusia ialah penciptaan lingkungan yang memungkinkan oleh masyarakat yang bisa merasakan umur panjang, hidup sehat dan melakukan kehidupan yang produktif. Semakin baik IPM suatu wilayah berarti menandakan bahwa sumber daya insani yang dimiliki semakin baik.

Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu dapat disusun

¹¹⁹ Ni Putu Sucritawati dan Sudarsana Eka, *Pengaruh Inflasi, Investasi, dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Bali*”, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol 2, No.1 Januari 2013, hal.51-62

kerangka pemikiran teoritis yang terdiri dari 4 variabel independen yaitu jumlah angkatan kerja, tingkat upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan manusia yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2013-2019



Keterangan :

Variabel Dependen : Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Timur (Y)

Variabel Independen : Jumlah Angkatan Tenaga Kerja (X1), Tingkat Upah Minimum (X2) , PDRB (X3) dan Indeks Pembangunan Manusia (X4)

H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Sehingga dalam hipotesisnya yang bersifat asosiatif adalah ada hubungan secara signifikan antara tingkat pengangguran kabupaten/ kota di provinsi Jawa

yaitu provinsi Jawa Timur. Pengkajian dilakukan dengan mengambil data dari tahun 2013 - 2019. Dengan beberapa faktor yang telah dibahas sebelumnya.

H₀ : berarti bahwa tidak ada hubungan yang signifikan

H_a : berarti terdapat hubungan yang signifikan

Berikut hipotesis yang terdapat pada penelitian ini :

1. H₁ : Ada pengaruh jumlah angkatan kerja yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Timur
2. H₂ : Ada pengaruh tingkat upah minimum yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Timur
3. H₃ : Ada pengaruh PDRB yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Timur
4. H₄ : Ada pengaruh indeks pembangunan manusia yang signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Timur
5. H₅ : Ada jumlah angkatan tenaga kerja, tingkat upah minimum, PDRB dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota di Jawa Timur